

ANALISA TERHADAP UKM SEBAGAI KEKUATAN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN DI INDONESIA

Sabil

Program Studi Sistem Informasi Akuntansi
AMIK BSI Jakarta
sabil.sbl@bsi.ac.id

ABSTRACT

Economic development in Indonesia until now tends to be influenced by two kekatan world economic system is a system of economic liberalism and shittim Socialist. We all know that in Indonesia also has a populist economic system but a populist economic system has been defeated by the economic system libral who ruled almost all countries, whereas Indonesia has long been known for the economic system based on democracy that includes taking into account the culture of the Indonesian nation. Economic Democracy is taken from the values of the Indonesian nation, democratic economic system in force since 1998 then the government was determined to implement democratic economic system by issuing a decree No.IV MPR / MPR / 1999 on Guidelines which states that Indonesia's economic system is a system of social economy. Welfare-oriented development and a wide range of discretion in favor of the interests of the people. people's economy developed in an effort to further promote the community. In other words, the concept of people's economy performed as a strategy to build more priority to the welfare of the community empowerment. people's economy can be realized by restructuring the political institutions at district level. Thus the economic development of the people's problems can not be separated from the political institutions in the District level. For it must create a political climate conducive to the economic development of the people. SMEs are the backbone is one of the activities berjalanya krakyatan economy in Indonesia, when the economic crisis hit Indonesia raksaksa firms experiencing fallout as well as many out of business, while SMEs exist at that time.

Keyword : SMEs, Economic Democracy

I. PENDAHULUAN

Usaha Kecil merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan, rumah tangga maupun suatu badan yang bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan sebesar 1 (satu) miliar rupiah atau kurang. Sementara Usaha Menengah merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan, rumah tangga maupun suatu badan yang bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan lebih dari 1 (satu) miliar.

UKM (usaha mikro kecil dan menengah) belakangan memiliki kontribusi yang sangat penting di dalam perekonomian Indonesia, hal ini dikarenakan sifat usaha UKM yang lebih fleksibel dalam menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. UKM mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dengan investasi yang kecil. Usaha-usaha UKM akan lebih diuntungkan oleh pertumbuhan ekonomi suatu lingkungan, dimana pasar berfungsi secara efektif dalam menyediakan berbagai jasa yang memungkinkan pertumbuhan

bisnis. Sementara ekonomi kerakyatan dicirikan dari keberpihakan terhadap kepentingan rakyat banyak. Mengapa kita harus menerapkan ekonomi kerakyatan, menurut BPS dalam Sumarto (2010:23) di donesia jumlah penduduk miskin tahun 2006 adalah 39,3 juta jiwa dan tahun 2007 jumlah penduduk miskin adalah 37,17 juta jiwa. Menurut Sumarto (2010:23) angka pengangguran terbuka tahun 2006 adalah 10,93 juta jiwa dan tahun 2007. Ini menunjukkan bahwa untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran diharapkan UKM dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Ekonomi Kerakyatan adalah sistem ekonomi yang dijalankan sekaligus melibatkan rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Di Indonesia ekonomi kerakyatan harus menjadi pondasi dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya dan pemerintah harus menjamin masyarakatnya agar bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan mampu membeli kebutuhan pokok. Pekerjaan yang layak dan daya beli masyarakat yang kuat merupakan syarat mutlak pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kerakyatan terletak pada besar kecilnya angka pertumbuhan ekonomi atau jumlah nominal

Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu pemerintah berperan besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan melibatkan rakyat sebagai sumber daya yang handal dan memberikan peluang yang cukup besar kepada usaha kecil dan menengah (UKM), serta kegiatan-kegiatan ekonomi rakyat baik yang ada di pedesaan yang berupa kegiatan pertanian dan nelayan, serta kegiatan ekonomi produktif lainnya dan melindungi ekonomi rakyat dari kekuatan ekonomi kapitalis. Untuk itu pemerintah dalam hal ini harus membangun elemen atau bagian-bagian kecil dalam perekonomian masyarakat yang berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Pengertian Ilmu Ekonomi

Samuelson (2003:4) menyatakan bahwa Ilmu Ekonomi adalah kegiatan bagi masyarakat dalam menggunakan sumberdaya yang langka untuk memproduksi komoditi dan mendistribusikannya pada masyarakat luas.

1.2. Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan identik dengan Ekonomi Pancasila, yaitu ekonomi yang digerakkan berdasarkan prinsip optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya teknologi, sumber daya permodalan, sumber daya manusia (pelaksana dan pakar) yang ada untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat banyak.

Rafick (2008:252) menyatakan bahwa Ekonomi Kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang memihak kepada kepentingan ekonomi sebagian besar rakyat secara adil, manusiawi dan demokratis.

Sistem ekonomi kerakyatan berlaku sejak 1998, kemudian pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan MPR RI No. IV / MPR / 1999, tentang GBHN yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Adapun ciri Sistem Perekonomian Kerakyatan adalah sebagai berikut:

1. Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat.

2. Memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan social dan kualitas hidup.
3. Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.
5. Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat

1.3. Pengertian UKM

UU Industri kecil No. 9 dalam Basri dan Nugroho (2009:33) menyatakan bahwa Industri kecil adalah aktifitas ekonomi yang dilakukan individu, rumah tangga, atau unit usaha dengan modal maksimal Rp. 200 juta dan penjualan pertahun di bawah Rp 1 milyar.

Keputusan Presiden No 99/1998 menyatakan bahwa pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”

Kriteria UKM menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini

Tabel 1 : Draf RUU UMKM Hasil Harmonisasi Dephukum 2005 (Kriteria UMKM)

Kriteria	Usaha Mikro	Usaha kecil	Usaha menengah
Bentuk usaha	Orang perorangan	Perseorangan / badan usaha bukan afiliasi menengah / besar	Perseorangan/badan usaha bukan afiliasi usaha besar

Kekayaan bersih	< Rp. 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan	Rp. 50 jt- Rp.500 jt tidak termasuk tanah dan bangunan	Rp.500 jt-10 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan
Omzet tahunan	< Rp. 300 juta	Rp. 300 jt-Rp.2,55 Milyar	Rp.2,5 milyar-Rp.50 milyar

Sumber : Basri dan Nugroho (2009:34)

1.4. Ciri-Ciri UKM

Ciri – ciri UKM adalah sebagai berikut : (Basri dan Nugroho,2009:38)

1. Manajemen berdiri sendiri, dengan kata lain tidak ada pemisahan yang tegas antara pemilik dengan pengelola perusahaan. Pemilik adalah sekaligus pengelola dalam UKM.
2. Modal disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik modal.
3. Daerah operasinya umumnya lokal, walaupun terdapat juga UKM yang memiliki orientasi luar negeri, berupa ekspor ke negara-negara mitra perdagangan.
4. Ukuran perusahaan, baik dari segi total aset, jumlah karyawan, dan sarana prasarana yang kecil. Pandangan umum bahwa UKM itu memiliki sifat dan jiwa entrepreneurship (kewiraswastaan) adalah kurang tepat. Ada sub kelompok UKM yang memiliki sifat entrepreneurship tetapi ada pula yang tidak menunjukkan sifat tersebut. Dengan menggunakan kriteria entrepreneurship maka kita dapat membagi UKM dalam empat bagian, yakni :

a. *Livelihood Activities*

UKM yang masuk kategori ini pada umumnya bertujuan mencari kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Para pelaku dikelompok ini tidak memiliki jiwa entrepreneurship. Kelompok ini disebut sebagai sektor informal. Di Indonesia jumlah UKM kategori ini adalah yang terbesar.

b. *Micro Enterprise*

UKM ini lebih bersifat “artisan” (pengrajin) dan tidak bersifat entrepreneurship (kewiraswastaan). Jumlah UKM ini di Indonesia juga relatif besar.

c. *Small Dynamic Enterprises*

UKM ini yang sering memiliki jiwa entrepreneurship. Banyak pengusaha skala menengah dan besar yang tadinya berasal dari kategori ini. Kalau dibina dengan baik maka sebagian dari UKM kategori ini akan masuk ke kategori empat. Jumlah kelompok UKM ini jauh lebih kecil dari jumlah UKM yang masuk kategori satu dan dua. Kelompok UKM

ini sudah bisa menerima pekerjaan sub-kontrak dan ekspor

d. *Fast Moving Enterprises*

UKM tulen yang memiliki jiwa entrepreneurship yang sejati. Dari kelompok ini kemudian akan muncul usaha skala menengah dan besar. Kelompok ini jumlahnya juga lebih sedikit dari UKM kategori satu dan dua

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka yang bersumber dari sejumlah literatur yang meliputi referensi buku-buku yang dapat menunjang isi penulisan, kemudian sejumlah situs internet yang dapat menambah wahana keilmuan sebagai penunjang topik pembahasan

IV. HASIL PEMBAHASAN

3.1. Usaha kecil dan Menengah (UKM)

UKM mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi karena intensitas tenaga kerja yang cukup tinggi dan investasi yang cenderung lebih kecil, sehingga UKM akan lebih fleksibel didalam menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Dengan pertimbangan kelangkaan modal dalam dalam negeri dan tingginya pertumbuhan angkatan kerja, maka perkembangan UKM akan menjadi kunci pendukung dalam menciptakan lapangan kerja.

UKM dapat beradaptasi terhadap perubahan kondisi perekonomian dunia dibandingkan dengan perusahaan besar. Di Indonesia diperkirakan ada 50 juta UKM ini menunjukkan potensi yang sangat luar biasa untuk membangun sistem ekonomi kerakyatan.

Basri dan Nugroho (2009:35) menyatakan bahwa benefit dan multiplier efek yang dihasilkan dari pemberdayaan UKM tersebut sesungguhnya dapat dilihat dari tertopangnya 68% sektor ekonomi nasional semasa Orde Baru, sumbangan UKM juga dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan antara tahun 1997-2001 berkisar 54,74% -57,68%, ini menunjukkan lebih dari separoh pendapatan negara disumbang oleh UKM.

Basri dan Nugroho (2009:15) menyatakan bahwa pemerintah melalui kementerian koperasi dan UKM menerapkan dua strategi penumbuhan enam juta usaha baru yaitu strategi yang umum dan strategi yang khusus

A. Strategi Umum

1. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan
2. Membudayakan kewirausahaan
3. Memberdayakan sumber daya melalui *learning by doing method*
4. Memberdayakan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

B. Strategi Khusus

1. Jalur Pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal
2. Jalur Pengusaha
3. Jalur Pembina

3.2. Tantangan UKM

Basri dan Nugroho (2009:51-52) menyatakan bahwa rendahnya semangat, kemauan dan jiwa kewirausahaan, rendahnya keterampilan (*life skill*) SDM, rendahnya penguasaan teknologi serta manajemen dan informasi pasar. Masalah SDM ini akan berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas pengelolaan manajemen usahanya.

Kemampuan UKM yang berkembang saat ini belum cukup merata kepada seluruh UKM, terutama karena terbatasnya jumlah dan kualitas dari lembaga pengembangan bisnis. Permasalahan eksternal UKM yang masih akan dihadapi adalah seperti belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha dan kelancaran prosedur perizinan, pelaksanaan persaingan usaha yang sehat, penataan lokasi usaha dan pelaksanaan otonomi daerah, khususnya kemajuan daerah melaksanakan pemberdayaan koperasi dan UKM.

Kecepatan pulihnya kondisi perekonomian secara makro akibat kenaikan BBM dan energi lainnya yang sangat berpengaruh kepada kegiatan produksi UKM. Masalah – Masalah seperti masih terbatasnya penyediaan produk jasa lembaga keuangan, khususnya kredit investasi, terbatasnya ketersediaan dan kualitas jasa pengembangan usaha bagi UKM dan keterbatasan sumberdaya finansial untuk usaha mikro sangat berpengaruh terhadap UKM. Di samping permasalahan-permasalahan tersebut di atas, pemberdayaan koperasi dan UKM juga menghadapi tantangan untuk berperan mengatasi persoalan sosial ekonomi, seperti penyediaan lapangan kerja dan penanggulangannya.

Beberapa kendala UKM menurut Badan Pusat Statistik antara lain : (Limbong,2010:54)

1. Kurang permodalan
2. Kesulitan Pemasaran
3. Persaingan Usaha Ketat
4. Kesulitan Bahan baku
5. Kurang Teknis Produksi dan Keahlian
6. Keterampilan Manajerial kurang
7. Kurang pengetahuan manajemen keuangan
8. Iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan / perundangan)

3.3. Langkah Menjadikan UKM Unggul

Beberapa langkah untuk menjadikan UKM menjadi unggul : (Rafick,2008:252)

1. Sumberdaya lokal menjadi basis utama
2. Memudahkan pembiayaan, menguasai teknologi serta dapat mengakses pasar luas
3. Menghadirkan lembaga penjamin kredit
4. Penggunaan teknologi yang berbasis pengetahuan lokal dan bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga riset lainnya.
5. Melakukan promosi produk bermuatan lokal (berbasis potensi sumberdaya alam) kekancah perdagangan internasional.

3.4. Strategi Pengembangan UKM

Strategi yang diterapkan dalam upaya mengembangkan UKM dimasa depan terlebih dalam memnghadapi pasar bebas di tingkat regional dan global sebaiknya memperhatikan beberapa hal diantaranya : (Basri & Nugroho,2009:90)

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menyediakan lingkungan yang mampu mendorong pengembangan UKM secara sistemik dan berkesinambungan.
2. Mempermudah perijinan, pajak dan restribusi lainnya.
3. Mempermuda akses pada bahan baku, teknologi dan informasi.
4. Menyediakan bantuan pelatihan dan pendampingan manajemen
5. Melakukan pertemuan lokakarya.
6. Mendorong untuk memiliki keahlian khusus di bidang administrasi dan pemasaran
7. Menciptakan sistim penjamin kredit.
8. Secara bertahap dan berkelanjutan mentransformasi sentra bisnis (parsial) menjadi klaster bisnis (sistemik)

3.5. Perkembangan Jumlah Pelaku UKM

Perkembangan jumlah pelaku UKM tampak dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2 : Perkembangan jumlah Pelaku Usaha Kecil Sektor Ekonomi 2006-2007

No	SEKTOR EKONOMI	JUMLAH UNIT		PERKEMBANGAN	
		Tahun 2006	Tahun 2007	Jumlah	%
1	Pertanian, Peternakan, kehutanan dan perikanan	4.642	4.675	33	0,71
2	Peternakan dan penggalian	12.911	13.234	323	2,50
3	Industri pengolahan	163.424	171.072	7.648	4,68
4	Listrik, gas & air bersih	878	911	33	3,76
5	Bangunan	25.890	27.441	1.551	5,99
6	Perdagangan, Hotel & restoran	1.313.294	1.388.950	75.656	5,78
7	Pengangkutan & Komunikasi	73.240	75.717	2.477	3,38
8	Keuangan, Persewaan, dan jasa Perusahaan	59.769	63.355	3.586	6,00
9	Jasa-jasa	263.849	272.571	8.722	3,31
	Jumlah	1.917.897	2.017.926	100.029	5,22

Sumber: Basri & Nugroho (2009:61)

Tabel 3 : Perkembangan jumlah Pelaku Usaha Menengah Sektor Ekonomi 2006-2007

No	SEKTOR EKONOMI	JUMLAH UNIT		PERKEMBANGAN	
		Tahun 2006	Tahun 2007	Jumlah	%
1	Pertanian, Peternakan, kehutanan dan perikanan	2.247	2.304	57	2,54
2	Peternakan dan penggalian	568	570	2	0,35
3	Industri pengolahan	17.573	18.280	707	4,02
4	Listrik, gas & air bersih	497	516	19	3,82
5	Bangunan	4.314	4.613	299	6,93
6	Perdagangan, Hotel & restoran	72.152	75.666	3.514	4,87
7	Pengangkutan & Komunikasi	3.496	4.068	572	16,36
8	Keuangan, Persewaan, dan jasa Perusahaan	8.179	8.570	391	4,76
9	Jasa-jasa	5.661	5.666	5	0,09
	Jumlah	114.687	120.253	5.566	4,85

Sumber: Basri & Nugroho (2009:61)

Tabel : 4. Perkembangan jumlah Pelaku Usaha Besar Sektor Ekonomi 2006-2007

No	SEKTOR EKONOMI	JUMLAH UNIT		PERKEMBANGAN	
		Tahun 2006	Tahun 2007	Jumlah	%
1	Pertanian, Peternakan, kehutanan dan perikanan	47	47	-	-
2	Pertambangan	75	81	6	8,00
3	Industri pengolahan	1.886	1.923	37	1,96
4	Listrik, gas & air bersih	139	144	5	3,60
5	Bangunan	223	233	10	4,48
6	Perdagangan, Hotel & restoran	1.167	1.219	52	4,46
7	Pengangkutan & Komunikasi	246	254	8	3,25
8	Keuangan, Persewaan, dan jasa Perusahaan	472	480	8	1,69
9	Jasa-jasa	143	146	3	2,10
	Jumlah	4.398	4.527	129	2,93

Sumber: Basri & Nugroho (2009:62)

Tabel:5 Jumlah pelaku UKM & Usaha Besar tahun 2006 dan 2007

No	Keterangan	Jumlah Unit		Perkembangan	
		Tahun 2006	Tahun 2007	Jumlah	%
1	Pelaku Usaha sektor kecil	1.917.897	2.017.926	100.029	5,20
2	Pelaku Usaha menengah	114.687	120.250	5.566	4,85

3	Pelaku usaha besar	4.398	4.527	129	2,93
Jumlah		2.036.982	2.142.703	105.724	12,98

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2013)

3.6. Kontribusi UKM dalam Penyerapan Tenaga Kerja

Besarnya kontribusi UKM dalam penyerapan tenaga kerja dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6 : Perkembangan Jumlah penyerapan Tenaga kerja Usaha kecil Sektor Ekonomi tahun 2006-2007

No	SEKTOR EKONOMI	JUMLAH UNIT		PERKEMBANGAN	
		Tahun 2006	Tahun 2007	Jumlah	%
1	Pertanian, Peternakan, kehutanan dan perikanan	182.811	185.015	2.204	1,21
2	Peternakan dan penggalian	76.975	79.815	2.840	3,69
3	Industri pengolahan	1.510.815	1.579.104	68.289	4,52
4	Listrik, gas & air bersih	17.093	16.715	(378)	(2,21)
5	Bangunan	197.313	208.323	11.010	5,58
6	Perdagangan, Hotel & restoran	3.623.447	3.766.573	143.126	3,95
7	Pengangkutan & Komunikasi	262.784	269.380	6.596	2,51
8	Keuangan, Persewaan, dan jasa Perusahaan	421.719	427.960	6.241	1,48
9	Jasa-jasa	3.306.523	3.347.759	131.236	3,97
Jumlah		9.599.480	9.970.644	371.164	3,87

Sumber: Basri & Nugroho (2009:74)

Tabel 7 : Perkembangan Jumlah penyerapan Tenaga kerja Usaha Menengah Sektor Ekonomi tahun 2006-2007

NO	SEKTOR EKONOMI	JUMLAH UNIT		PERKEMBANGAN	
		Tahun 2006	Tahun 2007	Jumlah	%
1	Pertanian, Peternakan, kehutanan dan perikanan	751.960	756.343	4.383	0,58
2	Peternakan dan penggalian	26.599	29.371	2.772	10,42
3	Industri pengolahan	1.918.824	1.990.972	72.148	3,72
4	Listrik, gas & air bersih	41.639	41.281	(358)	(0,86)
5	Bangunan	87.812	93.142	5.330	6,07
6	Perdagangan, Hotel & restoran	859.349	957.487	98.138	11,42
7	Pengangkutan & Komunikasi	150.842	153.421	2.579	1,71
8	Keuangan, Persewaan, dan jasa Perusahaan	386.048	416.237	30.189	7,82
9	Jasa-jasa	271.620	281.751	10.131	3,773
Jumlah		4.494.693	4.720.005	225.312	55,01

Sumber: Basri & Nugroho (2009:75)

Tabel:8 Jumlah penyerapan Tenaga kerja UKM & Usaha Besar Tahun 2006 & 2007

No	Keterangan	Jumlah Unit		Perkembangan	
		Tahun 2006	Tahun 2007	Jumlah	%
1	Pelaku usaha sektor kecil	9.599.480	9.970.644	371.164	3,87
2	Pelaku Usaha menengah	4.494.693	4.720.005	225.312	5,01
3	Pelaku usaha besar	2.445.595	2.520.707	75.112	3,07
Jumlah		16.539.717	17.211.356	617.588	11,95

Sumber: Hasil Pengolahan data (2013)

3.7. Analisa Pelaku Usaha tahun 2006 dan 2007

Berdasarkan tabel 5 bahwa analisa yang diberikan adalah membandingkan tabel-tabel yang ada dengan peran UKM terhadap jumlah pelaku ekonomi (UKM+Usaha Besar) dan serapan

UKM terhadap tenaga kerja pada tahun 2006 dan tahun 2007.

Jumlah Pelaku usaha tahun 2006 diantaranya adalah pelaku usaha kecil (UKM) berjumlah 1.917.897, pelaku usaha menengah (UKM) 114.687 dan pelaku usaha besar berjumlah 4.398 total berjumlah 2.036.982

Secara prosentase tahun 2006 : pelaku usaha kecil adalah : $1.917.897/2.036.982 \times 100\% = 94,15\%$, pelaku usaha menengah adalah $114.687/2.036.982 \times 100\% = 5,63\%$ dan pelaku usaha besar adalah $4.398/2.036.982 \times 100\% = 0,22\%$, kalau melihat hasil perhitungan ini maka secara prosentase dalam pelaku usaha UKM ($94,15\%+5,63\%$) = 99,78%, sementara pelaku usaha besar =0,22%, maka menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara UKM dan pelaku usaha besar karena UKM memberikan kontribusi 99,78 % sementara pelaku usaha besar hanya 0,22%.

Jumlah Pelaku usaha tahun 2007 diantaranya adalah pelaku usaha kecil (UKM) berjumlah 2.017.926, pelaku usaha menengah (UKM) 120.250 dan pelaku usaha besar berjumlah 4.527 total berjumlah 2.142.703

Secara prosentase tahun 2007 : pelaku usaha kecil adalah : $2.017.926/2.142.703 \times 100\% = 94,39\%$, pelaku usaha menengah adalah $120.250/2.142.703 \times 100\% = 5,40\%$ dan pelaku usaha besar adalah $4.527/2.142.703 \times 100\% = 0,21\%$, kalau melihat hasil perhitungan ini maka secara prosentase dalam pelaku usaha UKM ($94,39+5,40$) = 99,79%, sementara pelaku usaha besar =0,21%, maka menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara UKM dan pelaku usaha besar karena UKM memberikan kontribusi 99,79 % sementara pelaku usaha besar hanya 0,21%

Perkembangan pelaku UKM dan pelaku usaha besar tahun 2006 dibandingkan 2007 adalah: untuk tahun 2007 pelaku usaha kecil dari 99,15% meningkat menjadi 99,39 ada kenaikan 0,24%, pelaku usaha menengah dari 5,62% turun menjadi 5,40 ada penurunan 0,12% sementara pelaku usaha besar dari tahun 2006 ke 2007 juga mengalami penurunan dari 0,22% menjadi 0,21% ada penurunan 0,01%

3.8. Analisa Penyerapan Tenaga Kerja tahun 2006 dan 2007

Penyerapan Tenaga kerja pelaku usaha kecil tahun 2006 adalah 9.599.480, pelaku usaha menengah adalah 4.494.693 dan pelaku usaha besar adalah 2.445.595 total penyerapan tenaga kerja adalah 16.539.717. Secara prosentase penyerapan tenaga kerja adalah: pelaku ushah kecil $9.599.480/16.635.717 \times 100\% = 58,04\%$,

pelaku usaha menengah $4.494.693/16.539.717 \times 100\% = 27,17$, pelaku usaha besar $2.445.595/16.539.717 \times 100\% = 14,79\%$.

Dalam hasil perhitungan bahwa pelaku UKM menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja adalah ($58,04\%+27,17\%$) =85,21 %, sementara pelaku usaha besar hanya menyerap tenaga kerja sebesar 14,79%. Penyerapan Tenaga kerja pelaku usaha kecil tahun 2007 adalah 9.970.644, pelaku usaha menengah adalah 4.720.005 dan pelaku usaha besar adalah 2.520.707 total penyerapan tenaga kerja adalah 17.211.356. Secara prosentase penyerapan tenaga kerja adalah: pelaku ushah kecil $9.970.644/17.211.356 \times 100\% = 57,93\%$, pelaku usaha menengah $4.720.005/17.211.356 \times 100\% = 27,42$, pelaku usaha besar $2.520.707/17.211.356 \times 100\% = 14,65\%$

Perkembangan pelaku UKM dan pelaku usaha besar dalam penyerapan tenaga kerja tahun 2006 dibandingkan 2007 adalah : pelaku usaha UKM dalam penyerapan tenaga kerja dari tahun 2006 & 2007 adalah 85,21% menjadi 85,35% ada peningkatan pada tahun 2007 yaitu sebesar 0,14%, sementara pelaku usaha besar tahun 2006 sebesar 14,79% dan pada tahun 2007 sebesar 14,65% Ini mengalami penurunan sebesar 0,14%

Hasil analisa tersebut seolah menegaskan bahwa pendekatan ekonomi yang berorientasi kepada UKM agaknya cukup berhasil, terutama dalam mencegah dampak krisis finansial global sampai ke Indonesia. Karena itu, angka yang cukup fantastis bagi pembangunan perekonomian nasional ini, harus ditindaklanjuti dengan penghilangan kendala, hambatan dan gangguan di lapangan, baik itu Korupsi, perijinan dan pengurusan dan distorsi lainnya yang bisa merusak kultur dan struktur ekonomi yang berbasis kerakyatan ini.

V. PENUTUP

1. UKM dibagi kedalam empat bagian, yakni : *Livelihood Activities, Micro enterprise, Small Dynamic Enterprises, Fast Moving Enterprises.*
2. UKM mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi karena intensitas tenaga kerja yang cukup tinggi dan investasinya yang cenderung lebih kecil, sehingga UKM akan lebih fleksibel didalam menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan pasar.
3. Ekonomi kerakyatan adalah salah satu sistim ekonomi yang di Indonesia dan dapat bertahan menghadapi badai krisis ekonomi yang dialami negara Indonesia pada tahun 1997. Beberapa pondasi umum yang

- melandasi bisa bertahannya sistem ekonomi kerakyatan sampai pada saat ini karena didukung oleh Usaha kecil dan Menengah (UKM).
4. Pemberdayaan koperasi dan UKM juga menghadapi tantangan untuk berperan mengatasi persoalan sosial ekonomi, seperti penyediaan lapangan kerja dan penanggulangannya.
 5. Perbandingan jumlah UKM dibandingkan dengan pelaku usaha besar menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan yaitu 99,79%, sementara pelaku usaha besar hanya 0,21%. Untuk penyerapan tenaga kerja 85,21% menjadi 85,35% ada peningkatan pada tahun 2007 yaitu sebesar 0,14%, sementara pelaku usaha besar tahun 2006 sebesar 14,79% dan pada tahun 2007 sebesar 14,65%. Ini mengalami penurunan sebesar 0,14%
- Anoraga, Panji dan Ninik Widiyanti. 2003. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Bhineka Cipta
- Basri, Yuswar Zainul dan Nugroho Mahendro. 2013. *Ekonomi Kerakyatan : Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (dinamika dan pengembangan)*. Jakarta: Universitas Trisakti
- Limbong, Berhand. 2010. *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*. Jakarta: Pustaka Margareta
- Pramono, Sartika Titik. 2009. *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Samuelson, A.Paul. 2003. *Ilmu Mikro Ekonomi*. Jakarta: Media Global Edukasi
- Sumarto Agus Herta. 2010. *Jurus Mabuk Membangun Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Indeks.

DAFTAR PUSTAKA